

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, Solichin Wahab. (1990). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggara, Sahya. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Darwin, Muhadjir. (1998). *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Modul Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik.
- Dye, Thomas. R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Henry, Nicholas. (1995). *Public Administration and Public Affairs*. Engelwood Cliffs: New Jersey Prentice Hall Inc.
- Islamy, Irfan. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isnaini Rodiyah, I. U, et al. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keban, Yeremias. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gava Media.
- Lindblom, Charles. (1986). *Proses Penetapan Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Airlangga.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Nouvalitera.
- Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Neuman, William. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition. Harlow: Pearson Education Limited.

- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Jurnal:

- Aulia, N., & Prastyawan, A. (2023). Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Inovant*, 1(1), 30–41.
- Chakim, Mochammad. (2024). Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Humaira, G. A. (2024). Implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Anak di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 01(01), 1–17. <https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2341>
- Idris, J., Subhiyati, A. A., Saputra, O. A., Nugroho, A., & Jumanah. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah*, 8(1), 14–28. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v8i1.264>
- Kessumawati, Imel; Hakim, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 336–355. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.295>
- Kesya, Naswa. (2024). Kualitas Pelayanan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang. Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Najih, Mochammad. (2025). Analisis Kepuasan Pengguna Sipenduk Online Dalam Mendukung Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Rembang Menggunakan EUCS. Skripsi: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nurtiara, Eka; Afrizal; Afnira, E. (2025). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan Tahun 2024. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(3), 338–355. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.1026>
- Rafida, A. I., Andri, Putri, R. I., Wulandari, S. U., & Yohanes, Y. (2025). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 655–660. <https://doi.org/10.37676/mude/v4i3.8696>

- Riana, N. L. P. J., Purnamaningsih, P. E., & Winaya, I. K. (2023). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 1(3), 195–209. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.79>
- Rohman, N., Wirjatmi, E., Lestari, T., & Sufianti, E. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. *Dinamika: Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 130–141. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.4606>
- Rosidi, I., Warjio, & Susanti. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Sebuah Model Implementasi Program Pengembangan Fungsi Kartu Identitas Anak di Kota Sibolga). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(1), 918–926. <https://doi.org/10.36418/syntaxliterate.v10i1.56161>
- Septiana, S., & Rahman, A. (2025). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(1), 157–163. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1057>
- Sumarni, & Niningsih. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Prediksi: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 22(1), 12–23. <https://doi.org/10.31293/pd.v22i1.6859>

Media Massa:

- Indonesia News. (2022). Puluhan Ribu Anak di Kabupaten Rembang Belum Memiliki KIA. Berita Online, Edisi 22 Februari 2022, Diakses pada 8 September 2025 <https://www.indonesianews.co.id/2022/02/22/ratusan-ribu-anak-di-rembang-belum-memiliki-kia/>
- iNews Jateng. (2022). Sejumlah Peralatan Rusak, Layanan di Kantor Dindukcapil Rembang Tersendat. Berita Online, Edisi 21 Februari 2025, Diakses pada 10 September 2025

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2003). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2020). Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Rembang. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Rembang: Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
- Pemerintah Kabupaten Rembang. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2024. Rembang: Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
- Pemerintah Kabupaten Rembang. (2024). Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rembang: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- Pemerintah Kabupaten Rembang. (2025). Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Nomor 400/12/4/1/467/2025 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak. Rembang: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Website:

- Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang
<https://dindukcapil.rembangkab.go.id/>
- Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
<https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/>
- Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
<https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/>